

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- \_\_\_\_\_ *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- \_\_\_\_\_ *Peraturan Pemerintah tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah*. PP No. 49 Tahun 2008.
- \_\_\_\_\_ *Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota*, Undang-Undang No. 22 Tahun 2014.
- \_\_\_\_\_ *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

### B. Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung. 2002.
- Amrusi, Fahmi dan Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusamedia. 2012.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Malang: Sinar Grafika. 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Aziz, Abdul Hakim. *Impeachment Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2018.
- Effendi, A'an dkk. *Teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Kencana, Inu Syafie. *Pengantar ilmu pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama. 2010.
- Lubis, M.Solly. *Serba-Serbi Politik dan Hukum*. Jakarta: Softmedia. 2011.
- Karianga,Hendra. *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik*. Depok: Kencana. 2017.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dkk. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana. 2016.

Noor, M. Azis. *Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Badan Hukum Pembinaan Hukum Nasional. 2011.

Pangerang, Moenta dan Pradana Anugrah. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok : Rajawali Pers. 2018.

Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2010.

Sabon, Max Boli. *Hukum Otonomi Daerah*. Jakarta: Universitas Atma Jaya. 2011.

Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

### **C. Lain-lain**

Deperteman Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1999.

Guslina, Ira. “Menteri Dalam Negeri: 86 Persen Kepala Daerah Korupsi”. <https://nasional.tempo.com..> Diakses tanggal 24 Oktober 2021.

Hutapea, Bungasan. “Dinamika Hukum pemilihan Kepala Daerah di Indonesia”. *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 4 No. 1 April 2015.